



## PENGARUH OPINI, TEMUAN DAN KARAKTERISTIK DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PROVINSI JAMBI

Muhammad Rafi Bakri<sup>1\*</sup>  
 Tri Marhendra Rahardyan<sup>2</sup>

Badan Pemeriksa Keuangan RI  
 \*ravhemb@gmail.com

### ABSTRACT

*Financial performance is an indicator in determining the performance of local governments in managing regional finances. This study aims to empirically measure the effect of audit opinions and audit findings by BPK RI and regional characteristics on the financial performance of Jambi Province. Regional characteristics that become variables in this study are the level of independence and dependence on the central government. Financial performance can be measured using the ratio of effectiveness and efficiency. The population in this study was 9 districts and 2 cities in Jambi Province in 2017-2019. The analytical method used is quantitative analysis with multiple linear regression models. The results showed that the level of independence, the level of dependence on the central government, and the findings of each examination partially affected the level of effectiveness and efficiency of district/city financial management in Jambi Province. However, the audit opinion has no significant effect on the financial performance. Furthermore, the opinions, findings of the examination and regional characteristics simultaneously have a substantial impact on the financial performance of districts/cities in Jambi Province in 2017-2019.*

### INFO ARTIKEL

Diterima: 8 Februari 2022  
 Direview: 16 Maret 2022  
 Disetujui: 11 April 2022  
 Terbit: 1 Juni 2022

#### Keyword:

*Audit Opinion, Audit Findings, Regional Characteristics, Financial Performance*

### PENDAHULUAN

TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 yang disahkan pada tanggal 13 November 1998 menjadi landasan awal bagi Indonesia untuk melaksanakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah semakin didukung dengan munculnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Dengan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan dalam mengurus kepentingan daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan yang signifikan terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan ini

ditandai dengan penetapan satu paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Seperangkat aturan ini menjadi dasar bagi lembaga negara untuk mengubah metode pengelolaan keuangan menjadi manajemen keuangan (Pramono, 2014). Paket undang-undang keuangan negara tersebut juga menekankan pada akuntabilitas dan transparansi dalam *good governance*.

Pemerintah terus berupaya untuk

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Upaya tersebut dilaksanakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam rangka pertanggungjawaban tugas pemerintah sebagai pembuat kegiatan, pelayanan, dan pembangunan maka pemerintah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Heriningsih, 2015). LKPD tersebut disusun setiap tahun dengan mengacu Standar Akuntansi Pemerintah.

Menurut Kusnadewi (2019), APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disusun berdasarkan pendekatan target prestasi kerja dan dinyatakan dalam satuan moneter. APBD merupakan bentuk pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada visi dan misi serta rencana kerja daerah tersebut. Dengan adanya APBD, pemerintah daerah dapat mengukur kinerja keuangannya (Reynaldi Riantiaro & Nur Azlina, 2018).

Menurut Mahsun (2016), pengukuran kinerja keuangan dapat menggunakan teori *value for money*. Demirag (2018) menyatakan bahwa dalam teori *value for money* terdapat beberapa rasio, seperti efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Namun, rasio yang paling penting dalam pengukuran kinerja keuangan sektor publik adalah rasio efisiensi dan efektivitas. Kedua rasio ini berkaitan dengan pencapaian target dan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai target tersebut.

Dalam rangka menjamin kinerja keuangan pemerintah daerah, maka laporan keuangan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah selanjutnya akan diperiksa oleh auditor eksternal pemerintah. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004, auditor eksternal yang diberikan wewenang untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK tidak hanya memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) namun juga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga. Pemeriksaan tersebut terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan tersebut terdiri dari opini, temuan, dan rekomendasi BPK.

Opini pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK terdiri dari empat jenis, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini

pemeriksaan tersebut dimuat di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I Tahun 2017-2020 BPK RI memuat hasil pemeriksaan BPK atas LKPD pemerintah daerah termasuk 11 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Hasil pemeriksaan atas 11 LKPD kabupaten/kota di Provinsi Jambi dari tahun ke tahun mengalami dinamika yang cukup baik. Pada Tahun 2016 terdapat delapan kabupaten/kota yang mendapat opini WTP (72,73%), dua kabupaten/kota mendapat opini WDP (18,18%), dan satu kabupaten/kota mendapat opini TMP (9,09%). Pada Tahun 2017 Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat opini WTP, sehingga terdapat sembilan kabupaten/kota yang mendapat opini WTP (81,82%). Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pada tahun sebelumnya mendapatkan opini TMP mendapat opini WDP. Selain itu, Kabupaten Kerinci kembali mendapatkan opini WDP dan belum ada perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan yang sangat pesat didapat pada Tahun 2018-2019 karena seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi berhasil mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BPK juga mengungkapkan temuan pemeriksaan yang disusun di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Temuan pemeriksaan BPK terdiri dari dua jenis yaitu temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jumlah temuan pemeriksaan pada Provinsi Jambi dari Tahun 2016-2019 tergolong fluktuatif. Berdasarkan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jambi Tahun 2016 ditemukan 14 kelemahan sistem pengendalian internal dan empat kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2017, jumlah temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal turun menjadi 10 kasus dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berjumlah empat kasus. Namun, pergerakan positif tersebut gagal berlanjut karena pada Tahun 2018 temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal naik menjadi 14 kasus, salah satunya terkait belanja tunjangan guru sekolah dasar. Temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan naik menjadi 12 kasus. Kasus-kasus tersebut banyak melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan kerugian negara mencapai lebih dari 6 triliun rupiah. Atas kasus ini, Gubernur Jambi beserta

jajarannya di Dinas PUPR ditangkap oleh KPK. Pada Tahun 2019, temuan BPK turun menjadi delapan kasus atas kelemahan sistem pengendalian internal dan tiga kasus atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti pengaruh temuan dan opini BPK RI Tahun 2016-2018 serta karakteristik daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi Tahun 2017-2019. Penelitian Suryaningsih dan Sisdyani (2016) menyimpulkan bahwa opini pemeriksaan BPK RI berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan suatu daerah. Semakin banyak suatu daerah mendapatkan opini Tidak Wajar dan Tidak Memberikan Pendapat, maka semakin rendah kinerja keuangan daerah tersebut (Nugroho dan Rohman, 2012). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Artha, Basuki dan MT (2016) menyatakan sebaliknya.

Penelitian yang mencari pengaruh temuan pemeriksaan dengan kinerja pemerintah daerah oleh Artha, Basuki dan MT (2016) menghasilkan signifikansi negatif. Hal ini menandakan bahwa semakin banyaknya temuan pemeriksaan BPK maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin rendah. Signifikansi negatif ini sejalan dengan penelitian Qowi dan Prabowo (2017). Hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdin (2015) dan Lestari, Rahayu dan Yudi (2019) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara temuan pemeriksaan BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain variabel di atas, penulis juga menambahkan variabel lain yaitu karakteristik daerah. Menurut sejumlah penelitian yang mengaitkan karakteristik daerah dengan kinerja keuangan daerah antara lain dilakukan oleh Nugroho dan Rohman (2012), Suryaningsih dan Sisdyani (2016), Lestari, Rahayu dan Yudi (2019), dan Nurdin (2015) menyatakan bahwa karakteristik daerah mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Karakteristik daerah dapat dijabarkan dalam beberapa bagian antara lain tingkat kekayaan daerah, ukuran (*size*) pemerintah daerah, tingkat ketergantungan, belanja modal, dan *leverage* (Artha, Basuki dan MT, 2018). Kelima karakteristik tersebut merupakan komponen yang terdapat dalam LKPD yang diaudit oleh

BPK RI.

Hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya sangatlah beragam. Hal ini mendorong penulis untuk melaksanakan penelitian tentang pengaruh temuan dan opini BPK RI serta karakteristik daerah terhadap kinerja keuangan Provinsi Jambi Tahun 2017-2019. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah memfokuskan variabel temuan ke arah materialitas dari temuan tersebut. Materialitas dari temuan diharapkan akan menggambarkan kinerja keuangan lebih akurat dibandingkan dengan jumlah temuan seperti yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat berbagai rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh karakteristik daerah terhadap kinerja keuangan Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengaruh temuan pemeriksaan terhadap kinerja keuangan Provinsi Jambi?
3. Bagaimana pengaruh opini pemeriksaan terhadap kinerja keuangan Provinsi Jambi?

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori *Value for Money*

Sektor Publik dinilai sebagai sarang kecurangan, pemborosan, dan kerugian sehingga muncul tuntutan baru agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money*. Menurut Mardiasmo (2009), *value for money* merupakan konsep untuk melakukan pengelolaan berdasarkan pada tiga elemen yaitu ekonomis, efektivitas, dan efisiensi. Ekonomis berarti penggunaan sumber daya dan pengalokasian menggunakan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Suatu kegiatan dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan biaya yang tidak diperlukan.

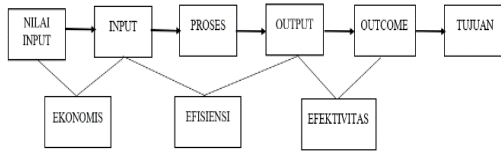
Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan. Efektif berarti penggunaan sumber daya yang ada digunakan secara tepat guna. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran, maka semakin efektif proses kerja pemerintah. Sebaliknya, jika kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran kecil, maka kinerja pemerintah bisa dikatakan tidak efektif.

Pengertian efisiensi sangat erat kaitannya dengan konsep produktivitas. Efisiensi berarti berdaya guna dalam pemanfaatan sumber daya yang ada untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien jika suatu output dapat

dihasilkan dengan biaya serendah-rendahnya (*spending less*).

Dari penjelasan di atas, ketiga elemen dalam *value for money* saling berhubungan. Hubungan antara ketiga elemen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 1. Teori Value for Money**

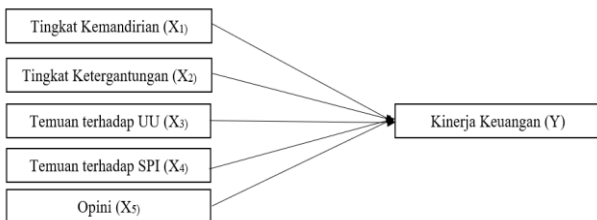


Sumber: Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, 2009)

**Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut:

**Gambar 2. Kerangka Pemikiran**



Sumber: Data diolah

**Pengembangan Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang, kerangka pemikiran, dan penelitian sebelumnya, penulis merumuskan hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

**H<sub>1</sub>: Tingkat kemandirian berpengaruh terhadap kinerja keuangan Provinsi Jambi.**

Tingkat kemandirian menunjukkan seberapa mandiri suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya tanpa melibatkan pemerintah pusat. Penelitian Nugroho dan Rohman (2012) dan Nurdin (2015) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari tingkat kemandirian daerah terhadap tingkat efektivitas namun tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi. Namun, Qowi dan Prabowo (2015) menemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara tingkat kemandirian dengan kinerja keuangan daerah.

**H<sub>2</sub>: Tingkat ketergantungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Provinsi Jambi.**

Tingkat ketergantungan daerah berbanding terbalik dengan tingkat kemandirian. Ketika suatu daerah mengandalkan pemerintah pusat, maka tingkat ketergantungan akan tinggi dan sebaliknya. Nurdin (2015) dan Nugroho dan

Rohman (2012) mendapat pengaruh yang signifikan antara tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, Suryaningsih dan Sisdyani (2016) menyimpulkan hal sebaliknya bahwa tidak ada pengaruh signifikan antar variabel tersebut.

**H<sub>3</sub>: Temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Provinsi Jambi.**

Temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan menggambarkan kinerja yang rendah oleh pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Artha, Basuki dan MT (2018) serta Qowi dan Prabowo (2017) menunjukkan hal demikian. Namun Lestari, Rahayu dan Yudi (2019) menemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan peraturan terhadap kinerja keuangan suatu pemerintah daerah.

**H<sub>4</sub> : Temuan audit atas kelemahan SPI berpengaruh terhadap kinerja keuangan Provinsi Jambi.**

Temuan pemeriksaan atas kelemahan sistem pengendalian internal membuat tingginya potensi kecurangan dalam pemerintahan sehingga berefek buruk terhadap kinerja keuangan. Hal ini sejalan seperti yang diungkapkan oleh Artha, Basuki dan MT (2018) serta Qowi dan Prabowo (2017). Namun, Nurdin (2015) menyimpulkan sebaliknya bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antar variabel tersebut.

**H<sub>5</sub> : Opini pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Provinsi Jambi.**

Opini pemeriksaan menjadi output akhir dari proses audit laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi opini maka akan semakin bagus kinerja keuangan daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryaningsih dan Sisdyani (2016). Namun, menurut Nurdin (2015) dan Nugroho dan Rohman (2012) opini pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan suatu daerah.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Data yang diperlukan merupakan data keuangan dan hasil audit masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jambi dari tahun 2016-2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi linear sebagai metode analisis data. Serangkaian uji yang dilakukan yaitu Uji Asumsi Klasik, Uji F, dan Uji T. Melalui serangkaian uji ini akan diperoleh korelasi dan

besaran hubungan antar variabel. Adapun model yang digunakan:

$$Y = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + C$$

Keterangan:

X<sub>1</sub> = Tingkat Kemandirian

X<sub>2</sub> = Tingkat Ketergantungan

X<sub>3</sub> = Temuan UU

X<sub>4</sub> = Temuan SPI

X<sub>5</sub> = Opini

Y = Kinerja Keuangan

C = Konstanta

Jika dalam uji regresi menghasilkan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka tingkat kemandirian, tingkat ketergantungan, temuan serta opini pemeriksaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi dan sebaliknya.

### Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Menurut Mardiasmo (2009) melalui teori *value for money*, kinerja keuangan yang menjadi indikator adalah tingkat efektivitas dan efisiensi. Hal ini dikarenakan indikator tingkat ekonomis tidak menjadi pertimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Sudarsana (2013), tingkat efektivitas menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan anggaran. Sedangkan menurut Sambow, Kawung dan Tenda (2016), efektivitas merupakan perbandingan antara yang direncanakan dengan hasil yang tercapai sehingga ketika pemerintah daerah mampu memenuhi targetnya dengan baik maka bisa dikatakan kinerja pemerintah daerah tersebut efektif. Menurut Mahsun (2016) rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Selain itu, tingkat efisiensi sendiri merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan dengan sasaran yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009). Hal ini sejalan dengan pengertian efisiensi yang diungkapkan oleh Bastian (2006), yaitu efisiensi merupakan kaitan antara *input* dan *output* yang digunakan oleh organisasi dalam rangka pencapaian target. Dalam ruang lingkungan pemerintah daerah, *input* dapat disamakan dengan realisasi belanja karena barang dan jasa yang dibeli dapat

tercermin melalui realisasi belanja. Sedangkan *output* dapat dinilai melalui realisasi pendapatan karena dapat mencerminkan target yang hendak dicapai (Kurnia, 2016).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

### Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah opini dan temuan pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Peneliti juga menambahkan dua variabel independen lain terkait karakteristik daerah, yaitu tingkat ketergantungan dan tingkat kemandirian. Dalam rangka mempermudah analisis, maka opini pemeriksaan yang dikeluarkan BPK harus dikuantifikasi. Berdasarkan penelitian Suryaningsih dan Sisdyani (2016), opini pemeriksaan diklasifikasikan menjadi WTP (4), WDP (3), TW (2), dan TMP (1).

$$\frac{\text{Temuan terhadap UU}}{\text{Realisasi Belanja}}$$

Temuan pemeriksaan dibagi menjadi dua, yaitu temuan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan temuan kelemahan sistem pengendalian internal. Selanjutnya, temuan ketidakpatuhan terhadap undang-undang perlu dihitung materialitasnya terhadap anggaran. Menurut Ridwan and Yahya (2020), materialitas dari temuan terhadap anggaran tersebut didapatkan dengan rumus sebagai berikut.

Menurut penelitian Sudarsana (2013), tingkat ketergantungan ditentukan dengan besarnya dana perimbangan. Rasio ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat dijabarkan dalam rumus berikut.

$$\frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Melalui rasio kemandirian dapat diketahui kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri untuk membiayai belanja. Menurut Bastian (2006), untuk menghitung tingkat kemandirian daerah dapat menggunakan rumus berikut.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**Uji Hipotesis**

***Pengaruh terhadap Tingkat Efektivitas Tahun 2017***

Setelah melewati serangkaian uji asumsi klasik, peneliti melakukan uji koefisien korelasi (R) untuk mengetahui seberapa besar variabel independen berhubungan dan mampu menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien korelasi adalah sebagai berikut.

**Tabel 1. Uji Korelasi Efektivitas Tahun 2017**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	,978 <sup>a</sup>	,956	,912	,0283802

a. Predictors: (Constant), Opini, TemuanSPI, TemuanUU, Ketergantungan, Kemandirian  
 Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan Tabel 1, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,978. Hal ini menunjukkan adanya hubungan variabel independen dan variabel dependen yang cukup tinggi yaitu sebesar 97,8%. Angka ini menunjukkan variabel independen (tingkat kemandirian, tingkat ketergantungan, temuan pemeriksaan, dan opini pemeriksaan) memengaruhi variabel dependen (efektivitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2017) sebesar 97,8%. Sementara sisanya 2,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar variabel penelitian.

Uji Statistik F dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik F (signifikansi simultan) ditunjukkan oleh tabel berikut.

**Tabel 2. Uji F Efektivitas Tahun 2017**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,087	5	,017	21,644	,002 <sup>b</sup>
Residual	,004	5	,001		
Total	,091	10			

a. Dependent Variable: Efektivitas  
 b. Predictors: (Constant), Opini, TemuanSPI, TemuanUU, Ketergantungan, Kemandirian  
 Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 2 menunjukkan nilai F hitung sebesar 21,664 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Oleh karena probabilitas signifikansi uji statistik F sebesar 0,002 lebih kecil dari tingkat

signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 3. Uji T Efektivitas Tahun 2017**

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
(Constant)	1,355		10,617	,000
Kemandirian	-,216	-,683	-4,983	,004
Ketergantungan	-,396	-,372	-2,714	,042
TemuanUU	-,392	-,921	-7,949	,001
TemuanSPI	,025	,562	5,293	,003
Opini	-,023	-,225	-2,288	,071

a. Dependent Variable: Efektivitas  
 Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan hasil dari Uji T seperti tabel di atas, maka semua variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap tingkat efektivitas Provinsi Jambi Tahun 2017 kecuali opini pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena angka signifikansi opini pemeriksaan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,071. Dari Uji T tersebut juga dapat dibuat persamaan regresi linear

$$Y_1 = 1,35 - 1,07X_1 - 0,39X_2 - 3,12X_3 + 0,02X_4 - 0,02X_5$$

***Pengaruh terhadap Tingkat Efisiensi Tahun 2017***

Setelah melewati serangkaian uji asumsi klasik, penulis melakukan uji koefisien korelasi (R) untuk mengetahui seberapa besar variabel independen berhubungan dan mampu menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien korelasi adalah sebagai berikut.

**Tabel 4. Uji Korelasi Efisiensi Tahun 2017**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	,964 <sup>a</sup>	,930	,859	,0177050

a. Predictors: (Constant), Opini, TemuanSPI, TemuanUU, Ketergantungan, Kemandirian  
 Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan Tabel 4, nilai koefisien korelasi sebesar 0,964. Hal ini menunjukkan adanya

hubungan variabel independen dan variabel dependen yang cukup tinggi yaitu sebesar 96,4%. Angka ini menunjukkan variabel independen (tingkat kemandirian, tingkat ketergantungan, temuan pemeriksaan, dan opini pemeriksaan) memengaruhi variabel dependen (efisiensi pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2017) sebesar 96,4%. Sementara sisanya 3,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar variabel penelitian.

**Tabel 5. Uji F Efisiensi Tahun 2017**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,021	5	,004	13,205	,007 <sup>b</sup>
Residual	,002	5	,000		
Total	,022	10			

a. Dependent Variable: Efisiensi

b. Predictors: (Constant), Opini, TemuanSPI, TemuanUU, Ketergantungan, Kemandirian

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 5 menunjukkan nilai F hitung sebesar 13,205 dan nilai signifikansi sebesar 0,007. Oleh karena probabilitas signifikansi uji statistik F sebesar 0,007 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain opini pemeriksaan Tahun 2016, temuan kelemahan SPI Tahun 2016, temuan ketidakpatuhan Tahun 2016, tingkat kemandirian Tahun 2017, dan tingkat ketergantungan 2017 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2017.

**Tabel 6. Uji T Efisiensi Tahun 2017**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	,448	,080		5,626	,002
Kemandirian	,319	,135	,409	2,365	,064
Ketergantungan	,568	,091	1,079	6,240	,002
TemuanUU	-,216	,245	-,129	-,883	,418

TemuanSPI	,009	,003	,435	3,246	,023
Opini	,012	,006	,243	1,957	,108

a. Dependent Variable: Efisiensi

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, tingkat ketergantungan dan jumlah temuan SPI memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap tingkat efisiensi Provinsi Jambi Tahun 2017. Selain itu, variabel seperti tingkat kemandirian, temuan undang-undang dan opini tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat efisiensi Provinsi Tahun 2017 karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Berdasarkan uji tersebut, maka dapat dibentuk persamaan seperti berikut.

$$Y^1 = 0,448 + 0,31X_1 + 0,568X_2 - 0,21X_3 + 0,09X_4 + 0,12X_5$$

**Pengaruh terhadap Tingkat Efektivitas Tahun 2018**

Berdasarkan Tabel 7, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,938. Hal ini menunjukkan adanya hubungan variabel independen dan variabel dependen yang cukup tinggi yaitu sebesar 93,8%. Angka ini menunjukkan variabel independen (tingkat kemandirian, tingkat ketergantungan, temuan pemeriksaan, dan opini pemeriksaan) memengaruhi variabel dependen (efektivitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2018) sebesar 93,8%. Sementara sisanya 6,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar variabel penelitian.

**Tabel 7. Uji Korelasi Efektivitas Tahun 2018**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	,938 <sup>a</sup>	,879	,758	,0487758

a. Predictors: (Constant), Opini, TemuanUU, Kemandirian, TemuanSPI, Ketergantungan

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 8 menunjukkan nilai F hitung sebesar 7,280 dan nilai signifikansi sebesar 0,024. Oleh karena probabilitas signifikansi uji statistik F sebesar 0,024 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain opini pemeriksaan Tahun 2017, temuan kelemahan SPI Tahun 2017, temuan ketidakpatuhan Tahun 2017, tingkat kemandirian Tahun 2018, dan tingkat ketergantungan Tahun 2018 secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap efektivitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2018.

**Tabel 8. Uji F Efektivitas Tahun 2018**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,087	5	,017	7,280	,024 <sup>b</sup>
Residual	,012	5	,002		
Total	,098	10			

a. Dependent Variable: Efektivitas  
 b. Predictors: (Constant), Opini, TemuanUU, Kemandirian, TemuanSPI, Ketergantungan  
 Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel di bawah, semua variabel independen kecuali opini pemeriksaan bernilai kurang dari 0,05. Hal ini berarti tingkat kemandirian, tingkat ketergantungan, temuan undang-undang, dan temuan kelemahan SPI masing-masing berpengaruh signifikan terhadap tingkat efektivitas Provinsi Jambi Tahun 2018.

**Tabel 9. Uji T Efektivitas Tahun 2018**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	3,187	,439		7,267	,001
Kemandirian	-1,650	,394	-,992	4,183	,009
Ketergantungan	-3,582	,635	-1,756	5,638	,002
TemuanUU	21,769	5,431	1,301	4,008	,010
TemuanSPI	,018	,007	,514	2,588	,049
Opini	,071	,040	,288	1,764	,138

a. Dependent Variable: Efektivitas  
 Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari tabel tersebut juga dapat disusun persamaan regresi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi tersebut adalah  $Y_1 = 3,19 - 1,65X_1 - 3,58X_2 + 21,76X_3 + 0,02X_4 + 0,07X_5$ .

**Pengaruh terhadap Tingkat Efisiensi 2018**

Setelah melewati serangkaian uji asumsi klasik, penulis melakukan uji koefisien korelasi (R) untuk mengetahui seberapa besar variabel independen berhubungan dan mampu menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan

Tabel 10, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,975. Hal ini menunjukkan adanya hubungan variabel independen dan variabel dependen yang cukup tinggi yaitu sebesar 97,5%.

**Tabel 10. Uji Korelasi Efisiensi Tahun 2018**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	,975 <sup>a</sup>	,950	,900	,0130738

a. Predictors: (Constant), Opini, TemuanUU, Kemandirian, TemuanSPI, Ketergantungan  
 Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 11 menunjukkan nilai F hitung sebesar 19,047 dan nilai signifikansi sebesar 0,003. Oleh karena probabilitas signifikansi uji statistik F sebesar 0,003 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain opini pemeriksaan Tahun 2017, temuan kelemahan SPI Tahun 2017, temuan ketidakpatuhan Tahun 2017, tingkat kemandirian Tahun 2018, dan tingkat ketergantungan Tahun 2018 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2018.

**Tabel 11. Uji F Efisiensi Tahun 2018**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,016	5	,003	19,04	,003 <sup>b</sup>
Residual	,001	5	,000		
Total	,017	10			

a. Dependent Variable: Efisiensi  
 b. Predictors: (Constant), Opini, TemuanUU, Kemandirian, TemuanSPI, Ketergantungan  
 Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 12 berisikan angka-angka penting termasuk nilai signifikansi yang menjadi tolak ukur variabel independen tersebut berpengaruh atau tidak. Berdasarkan hasil dari Uji variabel tingkat kemandirian, tingkat ketergantungan, dan temuan SPI memiliki angka signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini berarti variabel independen tersebut masing-masing berpengaruh terhadap tingkat efisiensi Provinsi Jambi Tahun 2018, sedangkan variabel temuan undang-undang dan opini pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan.



Dari Tabel III.36 juga dapat disusun persamaan regresi antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu  $Y_2 = 0,07 + 0,49X_1 + 1,14X_2 - 2,33X_3 - 0,01X_4 + 0,02X_5$ .

**Tabel 12. Uji T Efisiensi Tahun 2018**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	,069	,182		,379	,720
Kemandirian	,489	,111	,699	4,392	,007
Ketergantungan	1,139	,209	1,173	5,439	,003
TemuanUU	-2,333	1,248	-,334	-1,869	,121
TemuanSPI	-,006	,002	-,416	-3,417	,019
Opini	,018	,012	,173	1,528	,187

a. Dependent Variable: Efisiensi

Sumber: Data sekunder yang diolah

**Pengaruh terhadap Tingkat Efektivitas 2019**

Berdasarkan Tabel 13, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,971. Hal ini menunjukkan adanya hubungan variabel independen dan variabel dependen yang cukup tinggi yaitu sebesar 97,1%. Angka ini menunjukkan variabel independen (tingkat kemandirian, tingkat ketergantungan, dan temuan pemeriksaan) memengaruhi variabel dependen (efektivitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2019) sebesar 97,1%. Sementara sisanya 2,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar variabel penelitian.

**Tabel 13. Uji Korelasi Efektivitas Tahun 2019**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	,971 <sup>a</sup>	,943	,906	,0484777

a. Predictors: (Constant), TemuanSPI, Ketergantungan, Kemandirian, TemuanUU

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 14 menunjukkan nilai F hitung sebesar 25,040 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Oleh karena probabilitas signifikansi uji statistik F sebesar 0,001 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain temuan kelemahan SPI Tahun 2018, temuan ketidakpatuhan Tahun 2018, tingkat kemandirian Tahun 2019, dan tingkat ketergantungan 2019 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2019.

**Tabel 14. Uji F Efektivitas Tahun 2019**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,235	4	,059	25,040	,001 <sup>b</sup>
Residual	,014	6	,002		
Total	,249	10			

a. Dependent Variable: Efektivitas

b. Predictors: (Constant), TemuanSPI, Ketergantungan, Kemandirian, TemuanUU

Sumber: Data sekunder yang diolah

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (temuan kelemahan SPI Tahun 2018, temuan ketidakpatuhan Tahun 2018, tingkat kemandirian Tahun 2019, dan tingkat ketergantungan Tahun 2019) secara individual terhadap variabel dependen (efektivitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2019). Berdasarkan tabel di bawah, semua variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat efektivitas Provinsi Jambi Tahun 2019. Melalui uji tersebut juga dapat dibentuk persamaan regresi linear yaitu  $Y_1 = -0,73 + 2X_1 + 3,66X_2 - 118,48X_3 - 0,17X_4$ .

**Tabel 15. Uji T Efektivitas Tahun 2019**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			

(Constant)	-.735	,333		-2,207,069
Kemandirian	2,000	,368	,656	5,433,002
Ketergantungan	3,657	,411	1,115	8,900,000
TemuanUU	-118,488	22,219	-1,319	-5,333,002
TemuanSPI	-.167	,043	-.957	-3,898,008

a. Dependent Variable: Efektivitas

Sumber: Data sekunder yang diolah

**Pengaruh terhadap Tingkat Efisiensi 2019**

Berdasarkan Tabel 16, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,950. Hal ini menunjukkan adanya hubungan variabel independen dan variabel dependen yang cukup tinggi yaitu sebesar 95%. Angka ini menunjukkan variabel independen (tingkat kemandirian, tingkat ketergantungan, dan temuan pemeriksaan) memengaruhi variabel dependen (efisiensi pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2019) sebesar 95%. Sementara sisanya 5% dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar variabel penelitian.

**Tabel 16. Uji Korelasi Efisiensi Tahun 2019**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	,950 <sup>a</sup>	,903	,838	,0407862

a. Predictors: (Constant), TemuanSPI, Ketergantungan, Kemandirian, TemuanUU

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 17 menunjukkan nilai F hitung sebesar 13,948 dan nilai signifikansi sebesar 0,003. Oleh karena probabilitas signifikansi uji statistik F sebesar 0,003 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain temuan kelemahan SPI Tahun 2018, temuan ketidakpatuhan Tahun 2018, tingkat kemandirian Tahun 2019, dan tingkat ketergantungan Tahun 2019 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2019.

**Tabel 17. Uji F Efisiensi Tahun 2019**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,093	4	,023	13,948	,003 <sup>b</sup>
Residual	,010	6	,002		
Total	,103	10			

a. Dependent Variable: Efisiensi

b. Predictors: (Constant), TemuanSPI, Ketergantungan, Kemandirian, TemuanUU

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan uji T diperoleh hasil bahwa seluruh variabel independen kecuali tingkat ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi Provinsi Jambi Tahun 2019. Melalui Uji T dapat diperoleh persamaan regresi linear yaitu  $Y_2 = 0,636 - 1,67X_1 - 0,48X_2 + 72,58X_3 + 0,13X_4$ .

**Tabel 18. Uji T Efisiensi Tahun 2019**

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
(Constant)	,636	,280	2,270	,064
Kemandirian	-1,665	,310	-,850	,002
Ketergantungan	-,477	,346	-,227	,217
TemuanUU	72,581	18,694	1,259	,008
TemuanSPI	,133	,036	1,190	,010

a. Dependent Variable: Efisiensi

Sumber: Data sekunder yang diolah

**Pembahasan**

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh hasil bahwa tingkat kemandirian pemerintah daerah Tahun 2017, 2018, dan 2019 memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2017, 2018, dan 2019. Dengan meningkatnya kemandirian daerah, maka pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatannya sendiri untuk membiayai belanja daerah sehingga tidak bergantung pada pemerintah pusat. Hal inilah yang

menyebabkan kinerja keuangan dari kabupaten/kota di Provinsi Jambi meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdin (2015) dan Nugroho dan Rohman (2012). Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Qowi dan Prabowo (2017).

Tingkat kemandirian daerah pada Tahun 2017 tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah Tahun 2017. Namun, tingkat kemandirian pada Tahun 2018 dan 2019 berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah Tahun 2018 dan 2019. Dengan tingkat kemandirian yang semakin baik, maka pemerintah daerah dapat mengurangi biaya-biaya dalam memperoleh PAD sehingga meningkatkan tingkat efisiensi dari daerah tersebut. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdin (2015) dan Nugroho dan Rohman (2012).

Variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah Tahun 2017, 2018, dan 2019 juga memperlihatkan hasil yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat efektivitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2017, 2018, dan 2019. Ketika pemerintah daerah bergantung dengan pemerintah pusat, maka daerah tersebut akan kesulitan dalam menghasilkan pendapatan sendiri yang mengakibatkan tidak cukupnya dana untuk membiayai belanja. Hal ini akan menyebabkan penurunan pada tingkat efektivitas daerah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurdin (2015) dan Nugroho dan Rohman (2012). Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Suryaningsih dan Sisdyani (2016).

Tingkat ketergantungan daerah pada Tahun 2017 dan 2018 berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah Tahun 2017-2018. Dengan menurunnya tingkat ketergantungan daerah, maka daerah tersebut dapat menemukan cara tersendiri untuk beroperasi secara lebih efisien. Biaya-biaya operasional dalam memperoleh PAD menjadi berkurang dan tingkat efisiensi meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Nurdin (2015) dan Nugroho dan Rohman (2012). Namun, tingkat ketergantungan daerah pada tahun 2019 tidak berpengaruh

signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah Tahun 2019.

Temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan Tahun 2016, 2017, dan 2018 berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2017, 2018, dan 2019. Dengan tidak tepatnya prosedur pengelolaan keuangan, maka dapat dipastikan pemerintah daerah tersebut akan kesulitan mencapai target dari APBD yang telah disusun sehingga menurunkan tingkat efektivitas dari daerah tersebut. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Artha, Basuki dan MT (2018) serta Qowi dan Prabowo (2017). Di sisi lain, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lestari, Rahayu dan Yudi (2019).

Temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tahun 2016 dan 2017 tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2017 dan 2018. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Rahayu dan Yudi. (2019). Namun, temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2019. Hal ini disebabkan ketika pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai target APBD tidak dijalankan sesuai prosedur, maka banyak biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Biaya-biaya yang muncul dalam rangka pemerolehan PAD ini akan membuat penurunan pada tingkat efisiensi daerah tersebut.

Temuan pemeriksaan atas kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) Tahun 2016, 2017, dan 2018 berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2017, 2018, dan 2019. Lemahnya SPI, membuat potensi kecurangan (*fraud*) meningkat sehingga daerah akan kesulitan mencapai target APBD. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Artha, Basuki dan MT (2018) serta Qowi dan Prabowo (2017). Di sisi lain, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurdin (2015).

Temuan pemeriksaan atas kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) Tahun 2016, 2017, dan 2018 berpengaruh signifikan terhadap efisiensi

pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2017, 2018, dan 2019. Dengan tidak adanya pengendalian internal yang memadai, banyak biaya-biaya yang keluar secara percuma sehingga menurunkan tingkat efisiensi dari daerah tersebut. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Artha, Basuki dan MT (2018) serta Qowi dan Prabowo (2017). Di sisi lain, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurdin (2015).

Opini pemeriksaan Tahun 2016, 2017, dan 2018 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2017, 2018, dan 2019. Opini tahun sebelumnya tidak menggambarkan baik atau buruknya kinerja keuangan suatu daerah di tahun berikutnya. Kinerja keuangan ditahun berikutnya akan bergantung pada performa pemerintah daerah di tahun yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryaningsih dan Sisdyani (2016). Opini pemeriksaan Tahun 2018 tidak dapat dianalisis pengaruhnya terhadap tingkat efisiensi pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2019 karena semua pemerintah mendapatkan opini WTP.

## KESIMPULAN

Kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti tingkat kemandirian, tingkat ketergantungan, dan temuan pemeriksaan. Tingkat kemandirian menggambarkan seberapa mandiri kabupaten/kota di Provinsi Jambi dapat membiayai belanjanya sendiri menggunakan PAD yang telah dihasilkan. Ketika PAD yang dihasilkan semakin tinggi, maka kabupaten/kota tersebut dapat dengan mudah membiayai belanja. Belanja yang terealisasi tentunya akan meningkatkan kinerja keuangan dari kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Selanjutnya, tingkat ketergantungan memiliki hubungan terbalik dengan tingkat kemandirian. Ketika tingkat kemandirian tinggi, maka tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat semakin rendah. Rendahnya tingkat ketergantungan menggambarkan kabupaten/kota di Provinsi Jambi mampu membiayai belanjanya sendiri tanpa menunggu bantuan dari pemerintah pusat.

Hal ini membuat target-target dari daerah menjadi tercapai sehingga kinerja keuangan kabupaten/kota tersebut meningkat.

Temuan pemeriksaan terhadap ketidakpatuhan terhadap peraturan maupun kelemahan SPI menggambarkan kabupaten/kota di Provinsi Jambi tidak mampu menjalankan operasionalnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini juga membuat meningkatnya kemungkinan kecurangan (*fraud*) pada daerah tersebut. Kecurangan ini membuat target-target APBD menjadi sulit dicapai dan operasional daerah tidak berlangsung secara efisien.

Opini pemeriksaan tahun lalu tidak memiliki cukup bukti untuk memengaruhi kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi di tahun selanjutnya. Hal ini disebabkan opini pemeriksaan merupakan output dari hasil kinerja pemerintah daerah di tahun tersebut sehingga tidak berhubungan dengan kinerja keuangan daerah di tahun berikutnya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya meneliti pengaruh dari variabel independen tersebut terhadap kinerja keuangan Provinsi Jambi pada tahun 2016-2019. Hal ini dikarenakan sebelum tahun 2016 tidak ada perubahan yang signifikan pada opini pemeriksaan kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan jangka waktu lebih panjang lagi agar semakin menggambarkan kondisi nyata bagaimana pengaruh dari temuan dan opini pemeriksaan serta karakteristik daerah terhadap kinerja keuangan suatu daerah.

## REFERENSI

- Artha, R. D., Basuki, P. and MT, A. M. (2016) 'Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB)', *InFestasi*, 11(2), p. 214. doi: 10.21107/infestasi.v11i2.1133.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten/Kota di Jambi Tahun 2016*. Republik Indonesia: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2017. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*. Republik Indonesia: Badan Pemeriksa Keuangan.

- Badan Pemeriksa Keuangan. 2017. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten/Kota di Jambi Tahun 2017*. Republik Indonesia: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2018. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*. Republik Indonesia: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2018. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten/Kota di Jambi Tahun 2018*. Republik Indonesia: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2019. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*. Republik Indonesia: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten/Kota di Jambi Tahun 2019*. Republik Indonesia: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2020. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*. Republik Indonesia: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Bastian, I. (2006) *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. 1st edn. Jakarta: Erlangga.
- Demirag, I. (2018) 'A framework for examining accountability and value for money in the UK's Private Finance Initiative', in: Routledge, p. 16.
- Heriningsih, S. (2015) *Analisis Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi Dianalisis Dari Opini Auditor*.
- Kurnia, S. (2016) 'Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Economic Value Added', pp. 8–25.
- Lestari, K., Rahayu, S. and Yudi (2019) 'Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, Belanja Modal dan Temuan Audit BPK Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi)', *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 4(2), pp. 53–67. doi: 10.22437/jaku.v4i2.7796.
- Mahsun, M. (2016) *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. II. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo (2009) *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: ANDI.
- Nugroho, F. and Rohman, A. (2012) 'Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah)', *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), pp. 47–59.
- Nurdin, F. (2015) 'Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK RI Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah', 3(1).
- Pramono, J. (2014) 'Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah', *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7, pp. 83–112.
- Qowi, R. dan Prabowo (2017) 'Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2012', *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), pp. 1–13.
- Reynaldi Riantiarno & Nur Azlina (2018) 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 3(3), pp. 560–568.
- Ridwan, M. and Yahya, M. R. (2020) 'Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Temuan Audit Bpk, Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Ukuran Legislatif Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), pp. 429–437. doi: 10.24815/jimeka.v5i3.16055.
- Sambow, D. F., Kawung, G. M. V and Tenda, A. (2016) 'Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Di Kota Manado', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*,

16(4), pp. 247–259.

*Accounting*, 0(0), pp. 175–187.

Sudarsana, H. (2013) ‘Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia’, *Diponegoro Journal of*

Suryaningsih, N. and Sisdyani, E. (2016) ‘Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah’, *E-Jurnal Akuntansi*, 15(2), pp. 1453–1481.